



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : Terima Pengurus BP Lansia Bamsuet Dorong DPR dan Pemerintah Revisi UU Kesejahteraan Lansia
Tanggal : Senin, 07 Juli 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1

Terima Pengurus BP Lansia
Bamsuet Dorong DPR dan Pemerintah Revisi UU Kesejahteraan Lansia
Reporter & Editor :
UJANG SUNDA
Parlemen

facebook sharing button twitter sharing button whatsapp sharing button email sharing button share this sharing button
Senin, 7 Juli 2025 20:22 WIB

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo (kanan). (Foto: Dok. Bamsuet)
Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo (kanan). (Foto: Dok. Bamsuet)

A+ A-
RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi III DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsuet) mendorong DPR dan Pemerintah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia). UU yang telah berumur 27 tahun tersebut dibuat ketika struktur keluarga masih relatif tradisional dan ketergantungan pada solidaritas komunitas masih tinggi.

Saat ini, kata Bamsuet, realitas telah berubah. Urbanisasi, meningkatnya biaya hidup, menurunnya fungsi keluarga sebagai institusi perawatan, serta perkembangan teknologi yang eksklusif terhadap kelompok usia tua membuat lansia semakin terpinggirkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk lansia di Indonesia telah mencapai 11,75 persen dari total populasi pada tahun 2023, atau sekitar 32,5 juta jiwa. Angka ini diperkirakan terus bertumbuh hingga mencapai 20 persen pada tahun 2045.

Baca juga : Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Revisi Izin Berbasis Risiko

UU Nomor 13/1998 menetapkan bahwa lansia berhak atas penghormatan, perlindungan, dan pelayanan sosial, tetapi tidak memberikan mekanisme implementasi yang kuat dan terukur.

"Tidak ada pasal yang secara rinci mengatur standar layanan kesehatan lansia, bantuan perawatan jangka panjang, perlindungan terhadap kekerasan berbasis usia, atau skema insentif bagi keluarga yang merawat lansia di rumah," ujar Bamsuet, saat menerima Pengurus Badan Perlindungan Lanjut Usia Indonesia (BP Lansia), di Jakarta, Senin (7/7/2025).

Pengurus BP Lansia hadir antara lain Ketua Umum Karmen Siregar, Wakil Ketua Umum Robinson Napitupulu, Wakil Sekretaris Jenderal Monang Sirumapea, Bendahara Umum Menara Surya, Ketua Anton Hutabarat dan Ketua Imam Samudra.

Baca juga : Bamsuet Ingatkan Pentingnya Pembinaan bagi Pemilik Senjata Api

Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini memaparkan, ketiadaan jaminan hukum yang kuat memberikan dampak serius. Data Komnas Lansia dan laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan dan penelantaran terhadap lansia yang banyak terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Banyak dari lansia yang mengalami kekerasan ekonomi, dipaksa menyerahkan aset atau pensiun, atau sekadar diabaikan dalam kebutuhan dasarnya. Namun karena minimnya aturan hukum, serta tidak adanya mekanisme aduan yang ramah lansia, sebagian besar kasus tersebut tidak pernah sampai ke proses hukum.

Situasi menjadi lebih ironis jika melihat kenyataan bahwa sebagian besar lansia di Indonesia berada di sektor informal semasa produktifnya. Ketika pensiun tiba, mereka tidak memiliki jaminan hari tua atau dana pensiun, sehingga bergantung kepada anak atau komunitas. "Bahkan, banyak yang harus tetap bekerja di usia tua, menjadi penjaga warung, pemulung, atau buruh harian hanya untuk bertahan hidup," kata Bamsuet.

Baca juga : Demokrat Minta Pemerintah Perhatikan Perangkat Desa

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini mencontohkan, sejumlah negara lain semisal Jepang, telah memiliki kebijakan Long-Term Care Insurance (LTCI) yang mewajibkan pemerintah menyediakan layanan perawatan jangka panjang berbasis komunitas. Korea Selatan mengintegrasikan sistem e-health untuk lansia agar mereka dapat memantau kesehatannya sendiri dan mengakses layanan kesehatan dengan mudah. Selain itu, Vietnam sudah mulai memperkuat program home care berbasis desa sejak 2018.

Indonesia tidak bisa terus tertinggal. Rencana revisi UU Kesejahteraan Lansia sudah beberapa kali diwacanakan, namun hingga kini belum terlaksana. Padahal, regulasi baru yang responsif akan perkembangan zaman merupakan kebutuhan mendesak.

"Kita memerlukan undang-undang yang tidak hanya menyebut hak-hak lansia, tetapi juga menjamin pelaksanaannya dengan skema pembiayaan yang realistis, integrasi layanan lintas sektor, serta perlindungan hukum yang progresif," pungkas Bamsuet.

<https://rm.id/baca-berita/parlemen/271740/bamsuet-usulan-prof-jimly-soal-mekanisme-pemilihan-wapres-perlu-dipertimbangkan>